

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PULAU JAWA

Faris Dhiofani Putra

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email : farisd007@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran pemerintah di sektor pendidikan, anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 10 Kota di Pulau Jawa tahun 2012- 2017. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Panel Data dengan Fixed Effect Model. Data yang digunakan adalah data sekunder dan merupakan data kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia. Dari hasil analisis diketahui variable Anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan Anggaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif serta Jumlah Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Pembangunan Manusia (IPM), Anggaran, Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the government budget in the education sector, the government budget in the health sector and the number of poor people on the Human Development Index (HDI) in 10 cities on Java Island in 2012-2017. The analytical tool used in this study is the Data Panel Method with Fixed Effect Model. The data used is secondary data and is quantitative data. Data obtained from the Indonesian Central Bureau of Statistics. From the results of the analysis it is known that the variable government budget in education and government budget in the health sector has a positive influence and the number of poor population has a negative and significant influence on the Human Development Index (HDI) on Java.

Keyword : Human Development (HDI), Budget, poor population

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga tujuan inti dari proses pembangunan, antara lain yaitu meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap tiap negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh

United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*).

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli) (Mirza, 2014: 102). Melalui pendekatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan (Ananta, 2013).

Dalam beberapa Tahun terakhir tingkat kualitas manusia di Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang selalu meningkat dan masuk dalam kategori High Human Development. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan angka indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Pemerintah pun sudah mencanangkan beberapa program di berbagai sektor. Contoh sektor tersebut adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Di sektor kesehatan pemerintah memberikan banyak fasilitas diantaranya membangun gedung sekolah yang rusak, mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan kualitas sekolah dengan ditingkatkannya kurikulum sekolah. Pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidik atau guru dengan diadakannya sertifikasi untuk guru pegawai negeri sipil. Di bidang kesehatan pemerintah juga memiliki program yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Program tersebut adalah program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu pemerintah juga memperbaiki kualitas baik itu berupa alat alat kesehatan maupun bangunan

puskesmas dan rumah sakit daerah di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Dua sektor tersebut selalu diperbaiki pemerintah setiap tahunnya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

قَوَامًا ذَلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَفْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan/25: 67).

Ayat diatas berkesinambungan dengan variabel anggaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran tersebut agar dapat meningkatkan range indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Menurut BPS Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus membaik setiap tahunnya dan posisi Indonesia dalam urutan IPM di ASEAN menempati urutan keempat. Namun, IPM di 33 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan. Dari 33 provinsi di Indonesia hanya ada 2 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang mempunyai range IPM 75-80 dalam persen (BPS, 2012). Hal ini menarik karena hanya ada 2 provinsi di Pulau Jawa yang memiliki range IPM diatas 75, sementara 4 Provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten masih memiliki IPM dibawah range 75. Sementara menurut data BPS Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Kediri dan Kota Cirebon memiliki trend kenaikan IPM setiap tahunnya. Selain itu 10 kota diatas memiliki data yang lengkap dalam anggaran setiap tahunnya di kemenkeu, baik itu anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks sektor pendidikan, indeks sektor kesehatan, dan jumlah kemiskinan. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Berikut adalah table data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun 2012-2017.

Landasan Teori

1. Hubungan Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pendidikan sebagai investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan yang tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank dalam Winarti, 2014).

Isu mengenai sumber daya manusia sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu: pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014). Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah (Bastian dalam Syam, 2014)

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Winarti, 2014).

2. Hubungan Anggaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia

Becker dalam Saputri (2014) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi dalam *human capital* adalah dengan meningkatkannya kesehatan emosional dan fisik. Di negara-negara barat, pendapatan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan daripada kekuatan saat ini, namun pada masa lampau dan sampai sekarang, kekuatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan apalagi kesehatan emosional dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam menentukan pendapatan di seluruh dunia.

Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang di dalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. (Arifin, 2015)

Dengan demikian kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk akan mengurangi baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang

kurang baik pula. karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktifitas.

3. Hubungan Jumlah Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan Definisi kemiskinan menurut World Bank adalah *“The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedomself esteem and the respect of other.”* Intinya adalah kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik untuk memperoleh kesehatan, standar hidup yang layak, harga diri serta rasa dihormati seperti setiap orang lainnya.

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat yang memiliki dampak pada pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dicapai seseorang. Turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena rendahnya atau tidak memiliki pendapatan. Apabila tingkat pengangguran di suatu Negara sangat tinggi akan terjadi kekacauan politik dan sosial yang memiliki dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan perencanaan pembangunan ekonomi jangka panjang. Jika masalah pengangguran ini terjadi pada masyarakat yang berpendapatan rendah, maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Jika jumlah penduduk miskin meningkat hal itu menjadi kendala untuk meningkatnya indeks pembangunan manusia Indonesia. Maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan pengangguran yang ada di Indonesia agar tidak ada peningkatan pada jumlah penduduk miskin .

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang berupa catatan-catatan atau laporan dalam bentuk buku yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Data sekunder ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, hasil penelitian terdahulu, literature untuk melengkapi data–data yang diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan penggabungan antara data time series dan cross section. Time series yang digunakan berupa data sekunder tahunan periode 2010-2017. Cross section yang digunakan adalah 10 kota yang ada di Pulau Jawa

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terdapat pada Pulau Jawa yang merupakan wilayah selatan Indonesia yang memiliki beberapa permasalahan dalam pembangunan manusia yang masih bisa dikembangkan dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kabupaten/kota yang terdapat di Pulau Jawa merupakan bahan analisis dalam penelitian ini. Waktu penelitian yang dilakukan pada tahun 2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, hasil penelitian terdahulu, literature untuk melengkapi data–data yang diperlukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan penggabungan antara data time series dan cross section

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakstabilan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Berdasarkan Uji Breusch-Pagan-Godfrey, nilai Probabilitas dari semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 5%.

Tabel 5.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32.35401	21.43964	-1.509075	0.1369
LOG(APSP)	0.363679	0.801562	0.453713	0.6518
LOG(JPM)	0.748855	0.681525	1.098793	0.2766
LOG(APSK)	0.850016	0.616621	1.378507	0.1735

Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS 20

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	LOG(APSP)	LOG(JPM)	LOG(APSK)
LOG(APSP)	1.000000	0.618724	0.379968
LOG(JPM)	0.618724	1.000000	0.242632
LOG(APSK)	0.379968	0.242632	1.000000

Sumber : Hasil olah data menggunakan SPSS 20

Uji multikolinearitas bertujuan melihat adanya masalah multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien korelasi yang lebih besar dari [0,9].

Analisis Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/ pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*).

Dari tiga model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil terbaiklah yang akan digunakan dalam menganalisis. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam menganalisis apakah dengan

model *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed effect*, atau *model Random Effect (REM)*, maka dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

. Uji Chow

Dalam pengujian Uji Chow panel diestimasi menggunakan efek spesifikasi *Fixed*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*.

H_0 : *Common Effect*

H_1 : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari apha 5% maka H_0 ditolak. Sehingga, model menggunakan *Fixed effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi *fixed* adalah sebagai berikut

Tabel 5. 1
Hasil Test Fixed Effect-Likelihood Ratio

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	171.464046	(9,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	211.287158	9	0.0000

Sumber: Data Sekunder diolah 2019

Berdasarkan hasil olahan diatas, diketahui probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 sehingga menyebabkan H_0 ditolak Maka model *fixed* adalah model yang sebaiknya digunakan.

. Uji Hausman Test

Uji Hausman ini dilakukan bertujuan untuk mengeahui apakah *Random Effect Model* (REM) lebih dari *fixed Effect Model* (FEM).

H_0 : *Random Effect*

H_1 : *Fixed effect*

Apabila probabilitas Chi-square lebih besar dari alpha 5% maka sebaiknya model menggunakan *random effect*. Hasil estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Hasil Uji Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.731740	3	0.0133

Sumber: Data Sekunder diolah 2019

Hasil olahan diatas dihasilkan probabilitas Chi-quare sebesar 0,0175 lebih kecil dari alpha 0,05 maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan dalam model digunakan model *fixed effect*.

Tabel 5. 3
Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik dalam tabel berikut :

Variabel Dependen: IPM	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta ©	-4.101510	37.79115	17.46247
standar eror	16.33458	10.06224	7.560762
LOG(APSK)	2.154543	0.834482	0.885216
standar eror	0.469796	0.176763	0.174997
LOG(APSP)	0.886561	1.49590	1.635728
standar eror	0.610700	0.308945	0.300101
LOG(JPM)	-0.214310	-6.451655	-2.468954
standar eror	0.519245	1.601882	0.948134
R2	0.373568	0.981485	0.717881
F-statistik	11.13170	207.6220	47.49916
Probabilitas	0.000008	0.000000	0.000000
Durbin-watson Stat	0.128761	1.462543	1.121384

Sumber : Hasil olah data primer menggunakan SPSS 20

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan menggunakan uji likelihood dan hausman test ditemukan bahwa uji likelihood menyarankan untuk menggunakan fixed effect model sedangkan uji hausman test menyarankan untuk menggunakan uji random. Dapat dilihat pada tabel 5.5, perbandingan dari uji random dan fixed effect probabilitas setiap variabel dependen dan R-square bahwa pemilihan model regresi yang digunakan dalam analisis pengaruh Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Jumlah Kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa adalah fixed effect model. Dan alasan pemilihan

model fixed adalah dilihat dari koefisien determinasi, seberapa besar variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi yang dimiliki dari hasil estimasi model fixed sebesar 0.981485 yang lebih besar dibandingkan dengan kedua estimasi model yang lainnya

A. Hasil Estimasi Model Data Panel

Berdasarkan dari uji model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi data panel yang digunakan adalah fixed effect model (FEM). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak bias. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak sepuluh (10) Kabupaten atau Kota selama periode 2012-2017 (6 tahun).

Dari hasil regresi pada tabel 5.6 dibawah ini, maka dapat disimpulkan secara menyeluruh diperoleh hasil persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * X1 + \beta_2 * X2 + \beta_3 * X3 + et$$

Dimana :

Y	: Indeks Pembangunan Manusia
X1	: Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan
X2	: Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan
X3	: Jumlah Kemiskinan
β_0	: Konstanta
$\beta_{1...3}$: Koefisien Parameter
et	: Distribsance Error

Tabel 5. 4
 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect Cross-section SUR (GLS)*

Variabel Dependen: IPM	Model
	Fixed Effect
Konstanta ©	37.79115
standar eror	10.06224
LOG(APSK)	0.834482
standar eror	0.176763
LOG(APSP)	1.49590
standar eror	0.308945
LOG(JPM)	-6.451655
standar eror	1.601882
R2	0.981485
F-statistik	207.6220
Probabilitas	0.000000
Durbin-watson Stat	1.462543

Dari estimasi di atas, maka dibuat model analisis data panel terhadap analisis pengaruh Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Jumlah Kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa di peroleh hasil sebagai berikut:

$$IPM = 37.79115 + 0.834482X_1 + 1.496590X_2 - 6.451655X_3$$

B. Uji Statistik

Uji statistic dalam penelitian ini meliputi determinasi (R²), uji signifikan bersama-sama (uji statistic F) dan uji signifikan parameter individual (uji statistic t).

1. . Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil yang didapatkan pada tabel 5.5 menunjukkan nilai R² sebesar 0.981485 yang artinya bahwa perubahan tingkat IPM di Pulau Jawa 98.14 persen dipengaruhi oleh komponen Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Anggaran Pemerintah

Sektor Pendidikan dan Jumlah Kemiskinan. Sedangkan 1.86 persen dipengaruhi oleh variabel diluar variabel peneitian ini.

2. Uji Simultan (F-statistik)

Uji F digunakan untuk signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software *Eviews 10.0*, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0.000000, yang dimana lebih kecil dari angka kepercayaan 1 persen, maka Uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Jumlah Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya tingkat IPM di Pulau Jawa.

Tabel 5. 5
Uji T-statistik

Variabel	Koefisien regresi	Prob	Standar Prob.
LOG(APSK)	0.834482	0.0000	5%
LOG(APSP)	1.496590	0.0000	5%
LOG(JPM)	-6.451655	0.0002	5%

1. Pengaruh LOG(APSK) terhadap IPM di Pulau Jawa. Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel LOG(APSK) memiliki koefisien regresi sebesar 0.834482 dengan probabilitas 0.0000 yang artinya signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti apabila LOG(APSK) naik 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0.834482
2. Pengaruh LOG(APSP) terhadap IPM di Pulau Jawa. Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel LOG(APSP) memiliki koefisien regresi sebesar 1.496590 dengan probabilitas 0.0000 yang artinya signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti apabila LOG(APSP) naik 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan IPM 1.496590.
3. Pengaruh LOG(JPM) terhadap IPM di Pulau Jawa. Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel LOG(JPM) memiliki koefisien regresi -6.451655 dengan

probabilitas 0.0002 yang artinya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti apabila LOG(JPM) naik 1 persen maka menyebabkan penurunan IPM sebesar -6.451655 di Pulau Jawa.

B. Pembahasan Hasil Analisis

1. Pengaruh Jumlah Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut terbukti dengan nilai koefisien regresi sebesar -6.451655 dengan probabilitas 0,0002 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Kemiskinan biasanya dikenali dari ketidakmampuan sebuah rumah tangga atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berbagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. Kemiskinan memiliki wujud majemuk termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan yaitu kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendapatan, serta diskriminasi. Kemiskinan juga dicirikan oleh tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang rendah (Suyana Utama, 2010:16).

Tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan IPM akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang (Denni, 2012).

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Paradigma pembangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat

diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam IPM, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya IPM. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan (Mirza, 2012).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alyuriza Syalkahfi (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara jumlah kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia. Semakin banyak jumlah kemiskinan maka semakin rendah indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut terbukti dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.496590 dengan probabilitas 0,0000 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan IPM output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Kesehatan merupakan inti dari

kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak (Denni, 2012).

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta IPM serta pembangunan yang berkelanjutan (Parimin, 2015).

Anggaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan untuk sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat menjadi bekal dalam kegiatan pembangunan ekonomi lebih produktif dalam berdaya saing dan pada gilirannya diharapkan memiliki kemampuan ekonomi yang mapan dan stabil (Merang, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devianti Patta (2012) meyakini bahwa terdapat pengaruh positif antara anggaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut terbukti dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.834482 dengan probabilitas 0,0000 dimana angka tersebut signifikan karena ($p < 0,05$).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Anggaran pemerintah pada sektor kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan persyaratan bagi peningkatan produktivitas masyarakat (Baeti,

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa di atas yang diukur menggunakan beberapa variabel independen yaitu anggaran pemerintah di bidang kesehatan, anggaran pemerintah di bidang pendidikan, dan jumlah penduduk miskin. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa pada tahun 2012-2017. Yang artinya variable Jumlah Penduduk Miskin memiliki kontribusi negative dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama periode penelitian
2. Anggaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2012-2017, yang artinya variabel anggaran pemerintah di bidang kesehatan memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap IPM selama periode penelitian. .
3. Anggaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun

2012-2017, yang artinya variabel anggaran pemerintah di bidang kesehatan (APSK) memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap IPM selama periode penelitian.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Lebih efektif dalam penempatan anggaran yang terealisasi pendidikan dan anggaran kesehatan. Selain itu pemerintah harus lebih efisien dalam mengeluarkan anggaran agar tepat sasaran untuk meningkatkan IPM Indonesia
2. Memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sektor kesehatan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Sektor pendidikan ada Kartu Indonesia Pintar diharapkan tepat sasaran untuk masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup.
3. Pemerintah diharapkan merancang suatu program yang berkesinambungan agar dapat memacu naiknya nilai IPM dengan mempermudah masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi dan dipermudah dalam memperoleh akses kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, P. (2013). *Determinan Pembangunan Manusia Lampung*. Tesis, FEB Universitas Lampung.
- Astri, Meylinaet al.2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Vol 1, No.1*.UNJ. Jakarta
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Yogyakarta: Danisa Media.

- BPS Abdya. 2016. Aceh Barat Daya Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya. BAPPENA Sand UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report. (2004). The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia. Published Jointly by BPS-Statistic Indonesia
- Miswar. 2018. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol. 5 No.2
- Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, 2016, “*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur*”, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Volume 18, no 02.
- Mirza, D, S. (2012), *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah*, Journal Of Economics And Policy Vol.4, No.2.
- Patta, Devianti. 2012. *Jurnal: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010*. Sulsel
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPEF-UI Bima Grafika.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.